

SKRIPSI
PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI
PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Oleh :

AULIA HARY PUTRA

1310112105

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL



Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H., M.H.

Dayu Medina, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

**(Aulia Hary Putra, 1310112105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK
VI (Hukum Internasional), 58 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi keratkaitannya dengan HAM, karena setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya. Seperti pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka ini terdampar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena kelaparan membuat mereka dengan terpaksa menyerahkan diri ke pihak keamanan dan imigrasi Indonesia yang diharapkan dapat memberikan makan dan minum yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional; 2) Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh; Penelitian ini bersifat Kualitatif, dengan pendekatan masalah yang bersifat normatif didukung oleh penelitian empiris, sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Menurut Hukum Internasional Pemberian status pengungsi berimplikasi pada harus dilakukannya prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi yang telah diatur di dalam Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951. Konvensi tersebut mengatur prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam penanganan pengungsi, sedangkan menurut hukum nasional Indonesia belum ada instrumen hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah ini, namun Indonesia memandang dan menyikapi persoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal.; 2) Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang jelas dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara. Di sisi lain, sampai saat ini Indonesia juga bukan merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan protokolnya tahun 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi ini secara lebih lanjut. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR.

**THE ROLE OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN PROTECTING
THE SPIRITUAL REFUGEES IN ACEH ACCORDING TO
INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW**

**(Aulia Hary Putra, 1310112105, Faculty of Law, Andalas University, PK VI
(International Law), 58 pages, 2018)**

ABSTRACT

The status of the existence and protection of the related refugees with human rights, because everyone who has chosen the path to become an asylum seeker and even becomes a refugee are those who clearly do not get proper protection in human rights issues in their home countries. Like Rohingya refugees who come to Indonesia to seek asylum, they are stranded in several regions in Indonesia such as Aceh, Medan, Riau Islands, to Banyuwangi, East Java. The very alarming condition of starvation forced them to surrender themselves to the Indonesian security and immigration authorities who were expected to be able to provide proper food and drink. Therefore, the authors are interested in discussing the role of the Indonesian government in protecting Rohingya refugees in Aceh. The problems in this thesis are: 1) How to regulate protection of refugees in Indonesia according to International Law and National Law; 2) What is the role of the Indonesian government in protecting Rohingya refugees in Aceh; This research is qualitative, with a normative problem approach supported by empirical research, while the subject matter emphasizes the legal aspects (legislation) that apply, associated with practice in the field. Based on the results of the research that has been done, the following results are obtained: 1) According to International Law The provision of refugee status has implications for the principles of protection of refugees which have been regulated in the Geneva Convention on the Status of Refugees in 1951. The Convention regulates the basic principles that must be applied in handling refugees, whereas according to Indonesian national law there is no comprehensive legal instrument in dealing with this problem, but Indonesia views and addresses this issue as a universal human rights issue; 2) Indonesia does not yet have clear legal regulations in dealing with the problem of refugees across national borders. On the other hand, until now Indonesia is also not a country that has ratified the 1951 Vienna Convention and its 1967 protocol on refugees. Therefore, the Indonesian Government does not have the obligation and authority to carry out international actions regarding these refugees further. Indonesia can only accommodate and provide facilities needed by Rohingya refugees on humanitarian grounds while awaiting follow-up and process from UNHCR.